



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA PERSIDANGAN V
TAHUN SIDANG 2023-2024**

KAMIS, 11 JULI 2024

*Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om SwastiAstu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.*

Yang kami hormati:

- **Para Wakil Ketua DPR RI;**
- **Para Anggota DPR RI;**
- **Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Sidang Dewan yang terhormat,

Rakyat selalu menaruh harapan kepada lembaga DPR RI, sebagai pengemban amanat konstitusi untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

Berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat, semakin membutuhkan kehadiran negara; ketika negara terlambat atau dirasakan tidak merespon sebagaimana seharusnya, maka rakyat mengambil inisiatifnya sendiri, yang saat ini dilakukan dengan memviralkan di media sosial; *No Viral, No Justice*;

Hal ini menjadi tantangan bagi kita; rakyat telah mempercayakan kekuasaan negara dilaksanakan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif. Saatnya bagi lembaga kekuasaan negara tersebut menjalankannya secara efektif untuk menangani urusan-urusan rakyat.

DPR RI memiliki komitmen yang tinggi, untuk dapat memenuhi harapan rakyat, melalui fungsi-fungsinya DPR RI akan terus berupaya dapat mewujudkan kehidupan rakyat yang

semakin baik, semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin mudah.

Marilah kita, Anggota DPR RI Yang Terhormat, terus bekerja dengan komitmen yang tinggi untuk terus membangun kelembagaan DPR RI yang kuat secara substansi, tertib menjalankan kewenangan dan berdemokrasi dengan berkeadaban.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada masa persidangan ini DPR RI bersama dengan Pemerintah, telah menyetujui 55 (*lima puluh lima*) Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menjadi Undang-Undang (UU). Salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, yang diharapkan

dapat memperkuat peran negara dalam memastikan kesejahteraan Ibu dan Anak.

DPR RI pada masa persidangan ini juga telah menyetujui 33 (*tiga puluh tiga*) Rancangan Undang-Undang menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI.

DPR RI akan terus melanjutkan pembahasan terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang yang saat ini masih berada dalam Pembicaraan Tingkat I pada masa persidangan berikutnya dan tetap fokus untuk dapat menyelesaikannya hingga Pembicaraan Tingkat II dimasa persidangan terakhir DPR RI periode 2019-2024.

Sidang Dewan yang terhormat,

DPR RI bersama Pemerintah, dalam pembahasan Pendahuluan dan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun 2025 (KEM PPKF), telah menyepakati bahwa desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan antardaerah yang semakin baik.

DPR RI menekankan pentingnya RAPBN Tahun 2025 untuk memberikan ruang seluas-luasnya bagi Pemerintahan kedepan untuk dapat menjalankan visi dan misi Presiden terpilih.

Berbagai kesepakatan yang dihasilkan selama pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 pada masa sidang ini akan menjadi acuan strategis dalam penyusunan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025.

DPR RI akan terus mencermati agar Nota Keuangan dan APBN Tahun 2025 benar-benar selaras dengan amanat konstitusi yaitu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ini DPR RI telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 sekaligus penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 dari BPK RI.

DPR RI mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 80 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKK/L). Capaian ini menunjukkan komitmen seluruh jajaran kementerian dan lembaga dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam kesempatan ini DPR RI juga memberikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara.

DPR RI akan mencermati lebih lanjut dalam pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2023, untuk dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBN Tahun 2025, sehingga berbagai penyempurnaan tata kelola, sistem pengendalian internal, ketaatan atas peraturan perundang-undangan, serta produktifitas APBN dapat dilakukan, sehingga APBN semakin efektif dalam mensejahterakan rakyat dan membuat hidup rakyat lebih mudah.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam merespon dinamika perekonomian global yang memberikan tekanan pada perekonomian nasional, DPR RI bersama Pemerintah terus memastikan APBN Tahun 2024 tetap terjaga sehat, kredibel, dan mampu merespon, sehingga daya beli rakyat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi tetap kondusif.

Kinerja ekonomi yang baik ini diharapkan dapat terus dipertahankan pada tahun mendatang, mengingat gejolak eksternal makin sulit diprediksi.

Pada masa persidangan ini DPR RI melalui Tim Pengawas Haji DPR RI (Timwas Haji DPR RI) telah melaksanakan fungsi pengawasan, baik pada saat persiapan maupun pelaksanaan ibadah haji.

Salah satu rekomendasi Tim Pengawas Haji DPR RI adalah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pengawasan Haji. Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, DPR RI telah membentuk Pansus Hak Angket Pengawasan Haji Tahun 1445 H/2024 M.

Pembentukan Panitia Khusus Hak Angket Pengawasan Haji adalah untuk melakukan evaluasi atas kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang di duga tidak sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain permasalahan penyelenggaraan ibadah Haji, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan juga telah melakukan Rapat Kerja dan

Rapat Dengar Pendapat terkait permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat, antara lain:

- 1) Permasalahan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera);
- 2) Permasalahan pembatalan ratusan pelamar D4 Bidan Pendidik yang dinyatakan telah lulus seleksi PPPK 2023;
- 3) Permasalahan judi *online*;
- 4) Masuknya penyedia jasa internet Starlink;
- 5) Permasalahan pertanahan, termasuk mafia tanah dan sertifikat tanah elektronik; dan
- 6) Peredaran narkoba di wilayah perbatasan pulau Kalimantan.

Pemerintah perlu segera menindaklanjuti seluruh permasalahan tersebut sehingga rakyat merasakan kehadiran negara dalam mengurus rakyat.

Di samping itu, pada masa sidang ini DPR RI telah melakukan pembahasan terkait pemberian pertimbangan terhadap:

- 1) Tujuh calon duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara sahabat untuk Indonesia;
- 2) Tujuh belas calon anggota Lembaga Sensor Film (LSF) Periode 2024 -2028; dan
- 3) Pemberian kewarganegaraan RI kepada Atlit Sepakbola.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam melaksanakan diplomasi parlemen, pada masa persidangan ini DPR RI melalui BKSAP telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka penguatan fungsi diplomasi parlemen.

Kesuksesan pertemuan parlemen sebagai bagian dalam rangka Forum Air Dunia (*Parliamentary Meeting on the Occasion of 10th World Water Forum*), telah menandai komitmen bersama untuk menangani masalah krisis air, dan menghasilkan '*Nusa Dua Communique*' sebagai rangkaian komitmen pertemuan parlemen yang disepakati.

Selain kegiatan multilateral, parlemen Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral melalui kunjungan delegasi dari negara-negara seperti Qatar, Serbia, Hungaria, Irlandia, Turki, Hongkong, Serbia, Republik Rakyat Tiongkok, Norwegia, dan Belgia. Kegiatan pertemuan juga dilakukan parlemen Indonesia dengan Duta Besar Portugal untuk Indonesia serta kunjungan ke negara Tanzania dan Namibia.

Sebagai bagian dari diplomasi parlemen, DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Ke-2 *Indonesian Pacific Parliamentary Partnership* (IPPP) pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2024 di Jakarta. Forum ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan di berbagai bidang, termasuk konektivitas dan maritim, dengan negara-negara di kawasan Pasifik.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Atas nama Pimpinan DPR RI, menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh Anggota DPR RI dalam mewujudkan harapan rakyat.

Saatnya kita memasuki masa reses, untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional

yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia.

Atas nama Pimpinan DPR RI, saya mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 DPR RI memasuki Masa Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Selamat memasuki masa reses dan menyapa rakyat.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Om shanti shanti shanti om.

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.**

Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI

Lampiran:

➤ 55 Rancangan Undang Undang yang disetujui menjadi Undang Undang:

1. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
3. 53 RUU penyesuaian tentang kabupaten/kota terdiri 27 RUU kabupaten/kota Cluster 1 dan 26 RUU kabupaten/kota Cluster 2, antara lain:
 - 1) RUU tentang Kota Banda Aceh di Aceh;
 - 2) RUU tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh;

- 3) RUU tentang Kabupaten Pidie di Aceh;
- 4) RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh;
- 5) RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh;
- 6) RUU tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
- 7) RUU tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh;
- 8) RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh;
- 9) RUU tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara;
- 10) RUU tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara;
- 11) RUU tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara;

- 12) RUU tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara;
- 13) RUU tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara;
- 14) RUU tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara;
- 15) RUU tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara;
- 16) RUU tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara;
- 17) RUU tentang RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara;
- 18) RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara;
- 19) RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara;

- 20) RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
- 21) RUU tentang Kota Pematang Siantar di Provinsi Sumatera Utara;
- 22) RUU tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara;
- 23) RUU tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara;
- 24) RUU tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara;
- 25) RUU tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung;
- 26) RUU tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung;

- 27) RUU tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka dan Belitung;
- 28) RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau;
- 29) RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
- 30) RUU tentang Kabupaten LampungTengah di Provinsi Lampung;
- 31) RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
- 32) RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi;
- 33) RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi;
- 34) RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi;

- 35) RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi;
- 36) RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau;
- 37) RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau;
- 38) RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau;
- 39) RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau;
- 40) RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat;
- 41) RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat;
- 42) RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat;

- 43) RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat;
- 44) RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat;
- 45) RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat;
- 46) RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat;
- 47) RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat;
- 48) RUU tentang Kota Bukit Tinggi di Provinsi Sumatera Barat;
- 49) RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat;
- 50) RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat;
- 51) RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat;

52) RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat; dan

53) RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat.

➤ **17 Rancangan Undang Undang dalam Pembicaraan Tingkat I:**

- 1) RUU tentang Daerah Kepulauan;
- 2) RUU tentang Hukum Acara Perdata;
- 3) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa);

- 5) RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
- 6) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation in the Field of Defence*);
- 7) RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 8) RUU tentang Desain Industri;
- 9) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;

- 10) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Prancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Accord entre le Gouvernement de la République D'Indonésie et le Gouvernement de la République Française relatif a la Coopération dans le Domaine de la Défense*);
- 11) RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of*

- Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*);
- 12) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Agreement between the Government of Republic of Indonesia and the Royal Government of the Kingdom of Cambodia Concerning Cooperation in the Field of Defence*);
- 13) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federative*

Republic of Brazil on Cooperation in Defence Related Matters);

- 14) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Paten;
- 15) RUU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
- 16) RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara;
- 17) RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan;

➤ **33 Rancangan Undang Undang yang menjadi Usul Inisiatif DPR RI:**

- 1) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

- 2) RUU tentang Perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 3) RUU tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 4) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- 5) RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- 6) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden; dan
- 7) 27 (*dua puluh tujuh*) RUU tentang penyesuaian kabupaten/kota (kluster 5), antara lain:

- 1) RUU Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah;
- 2) RUU tentang Kabupaten Tolitoli di Sulawesi Tengah;
- 3) RUU tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah;
- 4) RUU tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah;
- 5) RUU tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 6) RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7) RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 8) RUU tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan;

- 9) RUU tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 10) RUU tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 11) RUU tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 12) RUU tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 13) RUU tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 14) RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 15) RUU tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 16) RUU tentang Kota Pare-Pare di Provinsi Sulawesi Selatan;

- 17) RUU tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 18) RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 19) RUU tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 20) RUU tentang Kabupaten Sidenreng di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 21) RUU tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 22) RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan;
- 23) RUU tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan
- 24) RUU tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;

- 25) RUU tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat;
- 26) RUU tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat;
- 27) RUU tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat

➤ **Kegiatan Diplomasi Parlemen:**

- 1) Konferensi Liga Parlemen Al-Quds ke-5 di Istanbul Turki (16-28 April 2024);
- 2) Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum di Bali, Indonesia (20-21 Mei 2024);
- 3) Sidang Komite Eksekutif Southeast Asian Parliamentarians against Corruption (SEAPAC) di Bali, Indonesia (22 Mei 2024);

- 4) Forum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-15 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam (11-12 Juni 2024);
- 5) Kunjungan Diplomasi Parlemen BKSAP ke Zimbabwe (10-16 Juni 2024);
- 6) Kunjungan Diplomasi Parlemen BKSAP DPR RI ke Namibia (2-8 Juni 2024);
- 7) Kunjungan GKSB DPR RI-Tanzania ke Tanzania (2-8 Juni 2024);
- 8) Kunjungan GKSB DPR RI-Parlemen Kanada ke Kanada (23-29 Juni 2024);
- 9) Kegiatan Asosiasi Parlemen Berbahasa Melayu ke Brunei Darussalam (24-26 Juni 2024);
- 10) Sidang the 1st P20 Meeting of Women Parliamentarians de Maceió-Alagoas Brazil (1-2 Juli 2024).